



Fraksi Amanat NasDem Solidaritas

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN PELAKSANAAN RESES

**MASA PERSIDANGAN PERTAMA
TAHUN SIDANG 2024/2025**

SEMARANG

2024

**LAPORAN PELAKSANAAN RESES
ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
FRAKSI AMANAT NASDEM SOLIDARITAS
MASA PERSIDANGAN PERTAMA
TAHUN SIDANG 2024/2025**

**Dibacakan Oleh:
BINTANG ROMADHON**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah,
Yang kami hormati Para Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,
Yang kami hormati Saudara Penjabat Gubernur Jawa Tengah,
Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Jawa Tengah,
Yang kami hormati segenap jajaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Yang kami hormati para mahasiswa, wartawan dan tamu undangan yang berbahagia.

Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan melaksanakan Rapat Paripurna pada hari ini dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024/2025, serta semoga kita semua selalu dalam ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ijinkan kami terlebih dahulu mengucapkan kepada Saudara-Saudara yang beragama Kristiani, Selamat Merayakan Natal, semoga kebahagiaan Natal dapat selalu membersamai Saudara semua. Dan juga kami ucapkan selamat menyongsong Tahun Baru 2025, semoga ditahun baru nanti kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Saudaraku Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Peningkatan fungsi dan peran lembaga DPRD sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tidak lain karena tuntutan demokrasi, terutama makin meningkatnya kesadaran politik masyarakat, sehingga mendorong Anggota DPRD untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan semangat pengabdianya kepada masyarakat, khususnya para konstituen di daerah pemilihannya.

Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sebuah kunjungan kerja, namun merupakan implementasi dari niat, maksud dan tujuan untuk mengintegrasikan program kegiatan pembangunan dengan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pelaksanaan reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak sekedar menjangring aspirasi masyarakat, namun memiliki kewajiban pula memberikan informasi program dan perkembangan kerja dan kinerja Pemerintahan Provinsi, serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami anggota Fraksi Amanat NasDem Solidaritas DPRD Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan kegiatan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024/2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing dengan hasil berupa rangkuman aspirasi dan permasalahan aktual dari elemen masyarakat. Dalam laporan pelaksanaan kegiatan Reses ini, kami Fraksi Amanat NasDem Solidaritas DPRD Provinsi Jawa Tengah mohon perkenan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, beberapa isu program dan kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan dan atau yang menjadi perhatian serta isu-isu baru terkait program dan kegiatan pembangunan yang menjadi usulan masyarakat. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan kegiatan Reses tentunya bukan sekedar merupakan kegiatan formalitas, tetapi perlu ada *good will* dan *political will* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengakomodir, mempertimbangkan dan

merealisasikan isu-isu program dan kegiatan pembangunan tersebut, dengan memperhatikan skala prioritas dan kecukupan anggaran.

Pelaksanaan Reses sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menentukan pelaksanaan reses paling lama 8 (delapan) hari pada Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2024/2025 ini adalah pada tanggal 17 s/d 24 November 2024.

Saudara Pimpinan Dewan, Gubernur dan Hadirin yang berbahagia.

Secara umum pelaksanaan Reses telah berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenalkan Fraksi Amanat NasDem Solidaritas DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hasil pelaksanaan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Perhelatan demokrasi yang besar dalam Tahun 2024 ini yakni melaksanakan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden pada Bulan Februari 2024 yang lalu, dan juga Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Bulan November yang lalu telah menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah dan di tingkat nasional, ijin kami Fraksi Amanat NasDem Solidaritas DPRD Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Pilkada di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, serta ditingkat Provinsi Jawa Tengah. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat berpihak kepada rakyat sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat didaerahnya masing-masing. Tak lupa kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai pihak penyelenggara dan pengawasan Pilkada serentak serta pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Tentara Nasional Indonesia yang telah mendukung aktif dalam proses pengamanan pilkada serentak di Jawa Tengah.

2. Penanganan masalah banjir di Ibukota Provinsi Jawa Tengah harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Mengingat kompleksitas masalah banjir yang melibatkan banyak faktor seperti curah hujan, tata kelola air, infrastruktur drainase, dan pengelolaan sampah, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat kota, kabupaten, maupun provinsi perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi yang terintegrasi. Koordinasi yang baik antar instansi di tingkat pemerintah daerah sangat penting agar penanganan banjir tidak berjalan terpisah-pisah dan bisa menghasilkan kebijakan yang efektif. Koordinasi Antar OPD mencakup berbagai bidang, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta OPD lainnya. Selain itu, tindak lanjut dari kebijakan atau program yang telah disusun harus jelas, dan pelaporan perkembangan penanganan banjir harus dilakukan secara berkala. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar berjalan dengan baik. Evaluasi yang berkelanjutan dan pengawasan yang melibatkan anggota Dewan dan masyarakat juga akan memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya terhenti di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan solusi nyata bagi penanggulangan banjir di Kota Semarang.
3. Pelibatan UMKM dalam Rantai Pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dimulai Januari 2025, akan melibatkan 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Program ini memerlukan anggaran besar sekitar Rp 95 triliun per tahun dan pasokan pangan yang melimpah. Oleh karena itu, warga masyarakat, terutama UMKM di tiap daerah atau kelurahan di Kota Semarang ingin benar-benar terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bukan hanya perusahaan besar atau yang memiliki koneksi kuat saja yg terlibat. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait beberapa langkah yang dapat diterapkan yaitu:
 - a) Skema Kemitraan yang Progresif : memberi prioritas kepada UMKM lokal.

- b) Penyederhanaan Proses Administratif: Mengurangi birokrasi dan prosedur yang rumit agar UMKM, terutama yang kecil, bisa dengan mudah bergabung dalam program MBG.
 - c) Standarisasi dan Pelatihan: Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM terkait standar kualitas pangan dan logistik yang dibutuhkan untuk MBG.
 - d) Pembatasan Peran Korporasi Besar.
 - e) Pengawasan dan Evaluasi: Membentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan UMKM, masyarakat, dan pemerintah.
4. Pemerintahan baru sering kali membawa harapan akan perubahan kebijakan yang lebih baik, terutama di sektor pendidikan. Salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius adalah sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya jalur zonasi sekolah. Zonasi awalnya diperkenalkan dengan tujuan mulia, yakni menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru menimbulkan berbagai permasalahan dan kontroversi yang tak kunjung usai. Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali, bahkan menghapus sistem zonasi, demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Sistem zonasi sejatinya lahir dari semangat untuk menyeimbangkan akses pendidikan antara sekolah-sekolah favorit dan non-favorit. Dengan menentukan penerimaan siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal, diharapkan setiap anak dapat bersekolah di tempat yang dekat dengan rumah tanpa harus bersaing ketat melalui nilai akademik semata. Pemerintah beranggapan bahwa langkah ini dapat menghapus stigma "sekolah unggulan" yang selama ini hanya bisa diakses oleh siswa dari kalangan tertentu. Namun, di tengah perjalanan, kebijakan ini justru memperlihatkan bahwa tujuan tersebut sulit dicapai, terutama karena infrastruktur pendidikan di Indonesia yang sangat tidak merata. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara sekolah-sekolah di pusat kota besar dan di daerah terpencil. Zonasi memaksa siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat,

tetapi tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak sekolah tersebut belum mampu memberikan pendidikan setara dengan sekolah-sekolah di kota besar. Pada sisi lain, sistem zonasi membatasi kesempatan siswa berprestasi untuk memperoleh pendidikan lebih baik. Sebelum zonasi diberlakukan, siswa dapat bersaing untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan melalui jalur prestasi. Memang ada jalur prestasi dalam sistem PPDB, tapi kuotanya relatif sangat kecil. Kini, banyak siswa dengan potensi akademik tinggi yang harus puas dengan sekolah di dekat rumahnya meskipun kualitasnya kurang memadai. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya Pemerintah Provinsi agar dapat mengusulkan persoalan ini kepada Pemerintah Pusat dengan berbagai pertimbangan yang ada termasuk pertimbangan kewilayahan yang luas di Provinsi Jawa Tengah.

5. Pembangunan perumahan dan permukiman tidak lepas dari adanya ketersediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bagi pengembang untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan perumahan. Untuk meningkatkan nilai amenities bagi masyarakat di lingkungan perumahan dan menciptakan perumahan yang layak dan memadai, pengembang melakukan pembangunan fasos fasum pada lahan yang telah tersedia. Membahas mengenai hal tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur dalam undang-undang yang menyebutkan bahwasanya setiap pengembang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan fasos fasum tersebut kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 150 peraturan dimaksud disebutkan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diantaranya Pasal 47 ayat

(4) maka dikenai sanksi administratif. Dalam Undang-Undang tersebut juga tercantum bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah. Pemerintah daerah meminta kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tata letak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UU tersebut sehingga fasos dan fasum yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dapat dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat.

6. Terkait pembangunan di desa harus dilandasi kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, sehingga anggaran yang digunakan tepat sasaran. Jika dilihat dari perkembangan saat ini alokasi dana desa sangat besar sehingga kepala desa harus cermat dalam menjabarkan anggaran tersebut dengan skala prioritas dan membawa dampak positif bagi peningkatan dan pengembangan desa. Namun demikian, program dan kegiatan yang telah terencana, adakalanya tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang masuk ranah hukum. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya Pemerintah Provinsi agar dapat memberikan pendampingan secara lebih intensif terhadap pemakaian dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi.
7. Pengembangan ekonomi kreatif dari desa perlu dimunculkan. Ekonomi kreatif di Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan, salah satunya melalui sinergitas bersama UKM berbasis pedesaan yang dapat diintegrasikan dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Kekuatan ekonomi kreatif terletak pada sumber daya manusia yang mengacu pada ide kreatif, inovatif dan unik.

Pemerintah Desa punya modal yg cukup besar untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi kreatif tersebut dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika dalam mempromosikan keunggulan dan potensi yang dimiliki. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlu Pemerintah Provinsi dapat memberikan dorongan dan bantuan kepada pemerintah desa untuk menganggarkan teknologi komunikasi dan informatika serta pendampingan terkait ekonomi kreatif di desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

8. Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait. Bencana bisa terjadi karena faktor alam dan akibat ulah manusia, hendaknya Pemerintah dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan hal ini ke daerah-daerah rawan bencana dengan melakukan deteksi dini dan cegah dini. Termasuk jika diperlukan adanya muatan lokal terkait penanggulangan kebencanaan yang diterapkan di setiap sekolah formal, yang tidak hanya sekedar teori, namun juga dilakukan simulasi agar siswa sejak dini benar-benar memahami terkait penanggulangan kebencanaan. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya Pemerintah Provinsi untuk menganalisis terkait usulan ini.
9. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya bantuan-bantuan kepada lembaga pendidikan swasta, tempat ibadah, kelompok tani/ternak/perikanan, kelompok seni dan organisasi kemasyarakatan tetap terus diprogramkan dan dialokasikan anggarannya dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan sumber daya manusia.
10. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan melalui berbagai kegiatan wirausaha. Sebab, potensi perempuan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Ini menunjukkan perempuan itu ulet, lebih tahan, dan semangatnya luar biasa. Pengoptimalan program pemberdayaan Perempuan juga sekaligus dapat menggenjot Upaya

pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi Perempuan juga dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi lokal yang ada. Mohon kepada Pemerintah Provinsi agar dapat meningkatkan program-program terkait pemberdayaan Perempuan ini.

11. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya program bedah rumah yang telah berlangsung di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan melalui berbagai program, di antaranya: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program lainnya dapat ditingkatkan, sehingga rakyat dapat merasakan Rumah Layak Huni agar dapat memberikan kenyamanan dan keberlangsungan hidup bagi masa depan keluarganya.
12. Normalisasi sungai merupakan upaya untuk memperbaiki tata air alami sungai atau saluran air. Tujuannya agar sungai dapat mengalir dengan baik dan tidak menimbulkan banjir atau erosi. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan normalisasi sungai dengan mengeruk lumpur di sepanjang sungai. Pengerukan ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi genangan dan banjir di beberapa sungai di Provinsi Jawa Tengah. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya melanjutkan program normalisasi sungai demi menjaga sungai itu sendiri juga sekaligus menjaga kawasan pemukiman disepanjang aliran sungai.
13. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya bantuan pengaspalan jalan, pipanisasi saluran air, penambahan lampu penerangan jalan perbaikan saluran irigasi, dan pembangunan jalan usaha tani demi menunjang keberlangsungan kehidupan rakyat.
14. Fraksi Amanat NasDem Solidaritas memandang perlunya bantuan peralatan kesehatan untuk rumah sakit dan klinik swasta yang ada di Provinsi Jawa Tengah utamanya yang berada di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta mendukung pemerintah dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian laporan hasil pelaksanaan Reses Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Amanat NasDem Solidaritas, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi atau sumbang pikir dalam rangka kemajuan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kita semua dalam upaya mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 30 Desember 2024
FRAKSI AMANAT NASDEM SOLIDARITAS
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

ttd

BINTANG ROMADHON
Ketua

dr. FAIZ ALAUDIEN REZA MARDHIKA
Sekretaris